



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



BULETIN

MINGGU KE-
JULI 2025

4

KEMENKUM KALSEL NEWS



ESTAFET KEPEMIMPINAN
KEMENKUM KALSEL



LAYANAN HUKUM TERPADU
DI RUMAH BUMN



PENGUATAN KEPALA
KANTOR WILAYAH

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Lampaui Target Presiden, Kemenkum Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih Melalui Sistem AHU Online



Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), yang rencananya akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang.

Direktur Jenderal AHU, Widodo, mengatakan bahwa Presiden menargetkan 80.000 unit KDMP dan KKMP, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, jumlah yang telah disahkan oleh Ditjen AHU telah melebihi target. Menurutnya, capaian ini didukung oleh transformasi digital melalui sistem AHU Online.

“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” katanya, Jumat (18/7/2025) di gedung Ditjen AHU.

Widodo menerangkan bahwa 80.068 KDMP/KKMP yang telah disahkan terdiri dari 71.397 unit KDMP baru, 8.486 unit KKMP baru, 141 unit koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP, dan 44 unit koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP. Kehadiran KDMP/KKMP ini akan membuat desa dan kelurahan menjadi lebih mandiri.

“Keberhasilan melampaui target ini adalah kemenangan bagi semangat gotong royong bangsa. Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” ujarnya.

Lulusan doktor ilmu hukum Universitas Padjajaran ini mengungkapkan bahwa pasca berlakunya Inpres 9/2025, Kemenkum menerbitkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Permenkum tersebut memberikan beberapa kemudahan dalam pendirian KDMP/KKMP.

Pertama, KDMP/KKMP diakui secara legal sebagai salah satu jenis koperasi yang dapat didaftarkan melalui sistem. Kedua, penyederhanaan penamaan, dimana persyaratan nama yang harus terdiri dari tiga kata setelah frasa jenis koperasi dikecualikan untuk Koperasi Merah Putih. Sebagai contoh, nama seperti Koperasi Desa Merah Putih Karangroto dapat langsung digunakan. Dan yang terakhir adalah digitalisasi seluruh proses pendirian KDMP/KKMP.

“Terakhir, proses digital terpadu dengan seluruh proses mulai dari pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di laman ahu.go.id. Kami memastikan bahwa sistem AHU Online andal dan mudah diakses,” ucapnya.



Ditjen AHU juga menggandeng para notaris untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih. Kolaborasi ini terbukti mampu menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program. Widodo pun berharap KDMP/KKMP dapat menjaga rantai pasok pangan serta memudahkan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan.

“Melalui koperasi ini, kita berharap rantai pasok pangan akan lebih efisien, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar seperti klinik dan apotek menjadi lebih mudah, dan inklusi digital dapat dipercepat. Ini adalah perwujudan nyata dari jiwa koperasi yang disampaikan Bung Hatta, yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk mengangkat derajat bersama,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Kemenkum mempunyai tugas dan fungsi dalam pendaftaran badan hukum, termasuk koperasi. Sejak bulan Mei lalu Kemenkum telah melakukan upaya-upaya percepatan pendaftaran Koperasi Merah Putih. Ia telah menginstruksikan jajaran di Kantor Wilayah Kemenkum untuk bekerja sama dengan notaris. Tidak hanya itu, optimalisasi sistem pelayanan publik secara digital terus ditingkatkan.

“Apa yang menjadi tuis kami, terkait pendaftaran koperasi, telah kami lakukan secara digital. Semua prosesnya jadi lebih cepat karena berbasis digital. Saya instruksikan Kantor Wilayah di 33 provinsi untuk sosialisasi terkait pelayanan ini. Hasilnya, alhamdulillah target Presiden bisa kita penuhi dan siap diluncurkan,” terang Supratman.

Dari Kalimantan Selatan, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah menyampaikan dukungan penuh atas capaian luar biasa Direktorat Jenderal AHU yang berhasil melampaui target Presiden dalam pengesahan Koperasi Merah Putih.

“Ini adalah bukti nyata bahwa transformasi digital yang diusung oleh Kemenkum mampu menjadi motor penggerak dalam mempercepat pemerataan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan. Di Kalimantan Selatan, kami siap mendukung penuh dengan mengencakan sosialisasi, mendorong sinergi dengan para notaris, serta memastikan seluruh layanan AHU Online dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di daerah. Kami percaya, Koperasi Merah Putih akan menjadi fondasi kuat kemandirian

Menkum: Hasil Kolaborasi Semua Pihak, 80 Ribu Lebih Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Disahkan Kemenkum



JAKARTA – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam usaha pengesahan Badan Usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

“Beberapa hari menjelang peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden, Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah mengesahkan lebih dari 80 ribu atau tepatnya 80.068 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Koperasi, Kepolisian, TNI/Polri dan Pemda setempat” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum mengatakan bahwa pendirian koperasi merah putih ini adalah salah satu bagian dari mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan dan penguatan ekonomi. “Koperasi Merah Putih diharapkan akan menjadi landasan strategis dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan.” tutur Supratman.

Sebelumnya, Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan, dari total 80.068 KDMP/ KKMP yang sudah disahkan terdiri dari pendirian KDMP baru sebanyak 71.397 unit, pendirian KKMP baru sebanyak 8.486 unit, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP sejumlah 141 unit dan koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP sejumlah 44 unit.

“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” kata Widodo.

Sebagaimana diketahui Koperasi Merah Putih akan diresmikan Presiden pada 21 Juli 2025 di Jawa Tengah. Langkah kolaboratif dalam membentuk KDMP/KDLP akan mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri.



Berikut adalah tanggapan secara terpisah dari Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, *Meidy Firmansyah*, terhadap konteks berita di atas:

“Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah menyampaikan pengesahan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini menjadi bukti konkret keberhasilan sinergi lintas sektor, dan kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan turut bangga menjadi bagian dari proses percepatan tersebut.

“Capaian ini tidak hanya mencerminkan efektivitas layanan digital yang dikembangkan oleh Ditjen AHU, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan, memfasilitasi pendirian koperasi di wilayah Kalimantan Selatan, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendorong ekonomi kerakyatan sebagaimana visi besar yang telah digariskan oleh pemerintah,” ucap Meidy.

Apel Pagi Senin: Kadiv PPPH Tekankan Disiplin, Kinerja Optimal, dan Partisipasi di Hari Pengayoman



Banjarasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan apel pagi rutin pada Senin, 21 Juli 2025. Apel yang digelar di halaman kantor ini diikuti oleh seluruh pegawai, sebagai wujud nyata pelaksanaan kedisiplinan dan semangat kebersamaan dalam memulai tugas kedinasan.

Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, sementara pemimpin apel diemban oleh Analis Hukum Ahli Muda, Sri Yunita.

Dalam amanatnya, Anton menegaskan pentingnya menjadikan apel pagi sebagai bagian dari budaya disiplin di lingkungan kerja. Ia juga menyoroti tentang optimalisasi pelaporan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kegiatan.

“Terkait realisasi anggaran, saya minta agar seluruh pemangku anggaran dapat segera menyampaikan laporan kegiatan secara akurat dan tepat waktu,” pesannya.

Lebih lanjut, Anton mengajak seluruh jajaran untuk terus memberikan pelayanan maksimal dalam rangka mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Kuncinya adalah kolaborasi dan koordinasi yang terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya dedikasi penuh dalam bekerja. “Berikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, agar seluruh harapan dan tujuan kita dapat tercapai,” tambahnya.

Menutup amanat, Anton mengimbau seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan Hari Bhakti Kemenkum, atau yang lebih dikenal sebagai Hari Pengayoman.

“Mari meriahkan bersama dengan semangat, termasuk melalui glorifikasi di media sosial sebagai bagian dari publikasi positif,” tuturnya.

Apel pagi berlangsung tertib dan penuh semangat, mencerminkan komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan akuntabel.





Kemenkum Kalsel Hadiri Peluncuran Nasional Koperasi Merah Putih dan Dialog Interaktif Bersama Presiden RI



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dengan turut hadir dalam Peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional yang dirangkaikan dengan Dialog Interaktif bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (21/7/2025).

Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia melalui konferensi daring, dan di Kalimantan Selatan terlaksana di antaranya di dua titik lokasi, yakni di Koperasi Desa Merah Putih Indrasari, Kabupaten Banjar, serta Koperasi Kelurahan Merah Putih Telawang, Kota Banjarmasin.

Di titik utama pelaksanaan di Kabupaten Banjar, kegiatan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur, unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, perwakilan BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan. Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel, Meidy Firmansyah, turut hadir dan mendapat sambutan hangat dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai, M.Si., serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Sementara itu, di titik pelaksanaan lainnya di Banjarmasin, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro mewakili Kanwil Kementerian Hukum Kalsel turut hadir dan menyaksikan peluncuran bersama Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR.

Kegiatan diawali dengan peninjauan koperasi oleh Gubernur Kalsel dan rombongan, kemudian dilanjutkan dengan arahan penting mengenai peran strategis koperasi desa dalam membangun perekonomian rakyat.

Puncak acara ditandai dengan peluncuran resmi 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, secara daring dari Klaten, Jawa Tengah. Presiden juga berdialog langsung dengan perwakilan koperasi dari berbagai daerah, termasuk dari Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya koperasi sebagai fondasi untuk membantu masyarakat lemah agar mampu bangkit secara ekonomi.

“Kita ingin mengubah ekonomi yang lemah menjadi kuat. Koperasi adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan dan persatuan bangsa. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi,” tegas Presiden Prabowo.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum siap mendukung aspek legalitas dan kelembagaan koperasi sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi rakyat.

“Kami dari Kementerian Hukum siap mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan hukum koperasi, mulai dari pengesahan badan hukum, pendampingan hukum usaha, hingga literasi hukum bagi pelaku koperasi. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam mendorong koperasi tumbuh secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Meidy.

Peluncuran ini turut disaksikan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para Menteri Kabinet, serta perwakilan dari berbagai elemen bangsa. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh antusiasme, menjadi simbol kehadiran negara dalam memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan koperasi-koperasi yang diluncurkan mampu berkembang secara profesional, inklusif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Goes to Pesantren: Kemenkum Kalsel Edukasi Santri soal KI dan Anti-Bullying



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan bertajuk “Kemenkum Kalsel Goes to Pesantren” di Pondok Pesantren Modern Al Furqan Muhammadiyah Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ditujukan untuk membekali para santri dengan wawasan tentang Kekayaan Intelektual (KI) dan pencegahan perundungan (bullying).

Lebih dari 150 peserta, terdiri atas santri baru, tenaga pendidik, dan pengurus pesantren, mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Dua pemateri utama dihadirkan untuk menyampaikan materi yang relevan dan aplikatif yakni M. Aji Rifani, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda dan Tulus Achir Cahyadi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum Kalsel.

M. Aji Rifani membuka sesi dengan paparan bertema “Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital”. Ia mengulas berbagai jenis KI, seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri, serta prosedur pendaftaran dan perlindungannya melalui sistem daring. Para santri diajak memahami bagaimana karya-karya nya - seperti lagu nasyid, ceramah, hingga produk kreatif berbasis pesantren - dapat dilindungi secara hukum.

Sesi berikutnya disampaikan oleh Tulus Achir Cahyadi, yang membahas secara mendalam isu perundungan di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren. Dengan pendekatan yang penuh empati, ia menjelaskan dampak psikologis bullying serta mendorong terbentuknya lingkungan yang aman, inklusif, dan suportif bagi seluruh warga pesantren. Tulus juga memberikan contoh konkret dan strategi pencegahan yang dapat diterapkan secara kolektif.



Kegiatan ini dikemas secara interaktif, dengan diskusi dan tanya jawab yang menggugah partisipasi aktif dari para peserta. Santri tampak antusias mengajukan pertanyaan, baik terkait langkah-langkah melindungi karya mereka secara hukum, maupun cara menghadapi situasi bullying dalam keseharian mereka di pesantren.

Secara keseluruhan, acara berlangsung lancar, tertib, dan produktif. Program ini tidak hanya memperkuat literasi hukum di kalangan santri, tetapi juga memperluas peran pesantren sebagai ruang tumbuh kembang generasi muda yang kreatif dan berdaya saing, sekaligus berkarakter kuat.

Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen melanjutkan inisiatif ini ke pesantren-pesantren lainnya di wilayah Kalimantan Selatan. Langkah selanjutnya mencakup pelatihan intensif dan pendampingan dalam pengembangan produk berbasis KI, sekaligus penguatan budaya anti-bullying di lingkungan pendidikan keagamaan.



Estafet Kepemimpinan di Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem Resmi Jabat Kakanwil



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dari Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah, kepada Kepala Kantor Wilayah yang baru, Alex Cosmas Pinem. Acara berlangsung khidmat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kalsel.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, yang sekaligus menjadi saksi dalam prosesi serah terima jabatan. Hadir pula Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana; Kepala Kantor Wilayah HAM Kalimantan Selatan, Karyadi; Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Welly Wiguna; Perwakilan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Pengurus Wilayah dan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI); Kepala Cabang BRI Samudera; Pejabat struktural serta seluruh pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkum, dilanjutkan dengan pembacaan doa, penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan serta penyerahan memori jabatan. Kegiatan ini juga disertai penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ketua Dharma Wanita Persatuan dan penayangan video penyambutan Kakanwil.

Dalam sambutannya, Meidy Firmansyah selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah yang lama menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Kakanwil yang baru dalam keluarga besar Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia turut melaporkan kondisi terkini Kanwil, mulai dari sumber daya manusia, capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK, hingga progres kinerja seperti capaian pembentukan KMP 100%, kemajuan dalam pengembangan Indikasi Geografis, serta pelaksanaan harmonisasi pembentukan produk hukum daerah dan penjarangan Paralegal Justice Award (PJA).



Meidy juga menyinggung kondisi aset yang masih digunakan bersama oleh tiga kantor wilayah serta progres pembangunan gedung baru di Banjarbaru.

Sementara itu, Alex Cosmas Pinem dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan. Ia memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran dan menyatakan komitmennya untuk membawa energi baru dalam menjalankan amanah sebagai Kakanwil Kemenkum Kalsel.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimis dapat menjalankan tugas dan meningkatkan kinerja Kanwil Kemenkum Kalsel ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Kepala BPHN, Min Usihen, menyampaikan harapan agar kehadiran pemimpin baru dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja. Ia menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV, serta memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Notaris dan Kemenkum, khususnya dalam pembentukan Koperasi Merah PutisKMP. Min Usihen juga menitikpkan agar program Posbakum Merah Putih dapat difasilitasi di Kalimantan Selatan serta mengingatkan bahwa Kakanwil adalah wajah Kementerian Hukum di daerah yang kinerjanya langsung dinilai oleh masyarakat.

“Jaga integritas, kuatkan teamwork, dan berikan kontribusi nyata. Ini bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak untuk meningkatkan kinerja Kemenkum di wilayah,” pungkasnya.

Kegiatan serah terima jabatan ini berlangsung lancar dan penuh kekhidmatan, menjadi momentum penting dalam melanjutkan roda kepemimpinan dan penguatan kinerja Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan.

Menuju Ekonomi Berdaulat, Presiden Luncurkan 80 Ribu Koperasi Berbadan Hukum



Klaten - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah meluncurkan kelembagaan 80.081 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah berbadan hukum di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan koperasi merupakan alat perjuangan bagi masyarakat kecil.

"Hari ini hari yang bersejarah. Kita meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kita mulai suatu usaha besar. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah (secara ekonomi), yang kuat (ekonominya) tidak mau berurusan dengan koperasi. Apalagi menjadi anggota koperasi," kata Prabowo.

Koperasi diklaim sebagai wadah bagi masyarakat terpinggirkan dalam sistem ekonomi, yang selama ini didominasi oleh kekuatan dan modal besar.

"Karena itu koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah (ekonomi), (koperasi) yang mengubah kelemahan menjadi kekuatan, (koperasi) selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati, karena kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi," kata Prabowo dalam sambutannya, Senin (21/07/2025) siang.

Peresmian kelembagaan KDMP ini menandai bahwa gerakan besar pemerintah untuk membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah mengesahkan lebih dari 80 ribu kelembagaan unit KDMP.

"Ini adalah bentuk kolaborasi yang dipimpin Kemenko Pangan dan dibantu berbagai instansi lainnya seperti Kemendagri, Kementarian Koperasi, Kepolisian, TNI/Polri dan Pemda setempat," jelasnya.

Keberhasilan melampaui target awal 80.000 unit koperasi ini dikarenakan kematangan sistem AHU Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang andal dan mudah diakses.

"Selain itu, lanjut Supratman, kebijakan inklusif yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal AHU nomor AHU-AH.02-40 Tahun 2025 memberikan kesempatan bagi seluruh notaris di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah melalui platform digital dan para profesional, seperti notaris di seluruh negeri, terbukti mampu menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program," jelas Supratman.

Supratman mengatakan pendirian KDMP ini merupakan salah satu bagian dari perwujudan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan dan penguatan ekonomi.

"Koperasi Merah Putih diharapkan akan menjadi landasan strategis dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan," kata Supratman. Sementara itu, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengatakan KDMP dimulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, seperti penggunaan balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai di setiap desa, aset pemerintah lainnya, dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar akan diintegrasikan dan digerakkan bersama-sama.

"Dengan pendekatan ini, Alhamdulillah dalam waktu kurang dari dua bulan, telah terbentuk lebih dari 80.081 koperasi desa/kelurahan merah putih telah sah secara hukum, dimana 108 diantaranya siap beroperasi," ujar pria yang akrab disapa Zulhas.

Pada saat tahap operasional nanti, persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait akan lebih diintensifkan lagi. Strategi ini diharapkan eksistensi KDMP dapat berkembang sesuai target pembentukannya.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem menyatakan dukungan penuh atas peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Presiden RI sebagai langkah strategis mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap mempercepat fasilitasi legalitas koperasi melalui sistem AHU Online, berkolaborasi dengan notaris, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya.

"Legalitas adalah fondasi kemandirian kelembagaan. Kami berkomitmen mengawal proses ini agar koperasi tumbuh berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat desa di Kalimantan Selatan," ujarnya.



Pengarahan Alex Cosmas Pinem Awali Kepemimpinan sebagai Kakanwil Kemenkum Kalsel, Tekankan Kinerja Optimal dan Integritas



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem memberikan pengarahan perdana kepada jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (23/7/2025) di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, serta seluruh pejabat manajerial dan non manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Alex menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil, mulai dari Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, hingga Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

"Berikan pelayanan terbaik, baik dalam pembentukan produk hukum daerah maupun dalam mendukung eksistensi Pos Bantuan Hukum Merah Putih. Kerjakan tugas dan fungsi kita dengan baik. Apa pun target kinerja yang diberikan, harus kita penuhi—dan jika memungkinkan, kita lampau. Terus belajar, jaga integritas, dan pastikan setiap pekerjaan sesuai dengan peraturan," tegas Alex.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi, baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal, termasuk instansi mitra, serta mendorong optimalisasi kerja sama antar sesama pegawai dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, sinergis, dan produktif.

Setelah pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja dan kondisi terkini dari masing-masing unit kerja, yaitu Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik, menandai awal kepemimpinan Alex Cosmas Pinem sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Menkum: Menjadi Tentara Asing, Secara Hukum Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan, Butuh Proses Hukum Jika Ingin Kembali WNI



JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara di negara asing.

“Saya tegaskan, jika seorang WNI menjadi tentara di negara asing maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan, ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Pasal 23 huruf d & e” tegasnya.

Pasal 23 mengatur tentang WNI yang kehilangan kewarganegaraan. Di huruf (d) dengan tegas berbunyi, WNI kehilangan kewarganegaraan jika “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”

Sementara huruf (e) juga menegaskan, seorang WNI kehilangan kewarganegaraan jika: “secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia”.

“Ketentuan Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pasal 31, PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Rekan rekan silahkan membaca detil isinya,” ungkap Supratman.

Lantas, bagaimana dengan peristiwa yang menimpa Satria Arta Kumbara, seorang mantan TNI angkatan Laut (AL) yang dikabarkan menjadi tentara di negara asing.

“Saya tegaskan, tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing karena sudah melanggar UU Kewarganegaraan RI,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, polemik status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara, mantan TNI Angkatan Laut (AL) yang sempat menjadi tentara asing kembali mengemuka setelah yang bersangkutan diberitakan di berbagai media menyesal telah menandatangani kontrak menjadi tentara asing dan ingin kembali menjadi WNI.

Namun demikian, Menteri Hukum juga memastikan sampai saat ini, Kementerian Hukum belum pernah menerima laporan secara resmi termasuk perwakilan di luar negeri status Satria Arta yang menjadi tentara di negara lain.

“Jika memang yang bersangkutan terbukti menjadi tentara asing maka otomatis kehilangan status kewarganegaraan dan jika ingin kembali menjadi WNI maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yang merupakan bagian dari proses pewarganegaraan (naturalisasi murni),” pungkasnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyatakan dukungan penuh terhadap penegasan Menteri Hukum RI terkait status kewarganegaraan. Hal ini mengingatkan kembali bahwa menjadi tentara asing tanpa izin Presiden merupakan dasar hukum kehilangan kewarganegaraan secara otomatis.

“Kami sepenuhnya sejalan dengan arahan Bapak Menteri. Aturan ini melindungi prinsip kedaulatan dan kesetiaan warga negara terhadap NKRI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa proses untuk kembali menjadi WNI harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. “Kewarganegaraan adalah status hukum yang tunduk pada mekanisme yang sah. Jika seseorang ingin kembali menjadi WNI, maka harus menempuh prosedur pewarganegaraan sesuai peraturan perundang-undangan,” pesannya.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Rapat Penguatan Tugas dan Fungsi Bersama Sekretariat Jenderal



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Rapat Penguatan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang digelar secara virtual oleh Sekretariat Jenderal melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 23 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah, khususnya dalam hal memaksimalkan kinerja melalui pembagian kewenangan yang lebih optimal antara pusat dan wilayah. Salah satu topik penting yang dibahas dalam rapat adalah masukan dari Kantor Wilayah mengenai kewenangan pusat yang dinilai lebih efektif apabila didelegasikan ke wilayah, demi mempercepat pelayanan hukum dan administrasi di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan kesiapan jajarannya apabila diberikan mandat pelimpahan kewenangan oleh pusat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia, khususnya tenaga fungsional seperti Pemeriksa Paten atau Pemeriksa Merek, jika nantinya kewenangan penerbitan sertifikat merek didelegasikan ke Kantor Wilayah.

Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, serta menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, akurat, dan berdaya saing.



Kemenkum Kalsel Gelar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Bumi Kencana Peringati Hari Pengayoman ke-80



Banjarbaru, Humas_Info — Dalam rangkaian memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bumi Kencana, Banjarbaru, pada Kamis (24/7/2025).

Upacara berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, selaku Inspektur Upacara. Turut hadir mendampingi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta jajaran pejabat manajerial, pejabat non manajerial dan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, hingga prosesi tabur bunga di makam para pahlawan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa ziarah ini bukan hanya bentuk penghormatan semata, namun juga momentum reflektif dalam memperkuat semangat pengabdian sebagai insan Pengayoman.

“Kita menundukkan kepala di hadapan para pahlawan bukan sekadar mengenang jasa mereka, tetapi juga sebagai pengingat agar setiap langkah kita di Kemenkum senantiasa berlandaskan nilai-nilai pengabdian, integritas, dan pengorbanan,” ujar Alex.

Ia juga menyampaikan harapan agar semangat para pahlawan menjadi inspirasi dalam mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan yang semakin profesional dan humanis di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini berjalan lancar, tertib, dan penuh kekhidmatan. Momentum ini juga menandai rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-80 tahun 2025 di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel yang mengangkat tema 80 Tahun Pengayoman : Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan.



Dukung UMKM di Rangkaian Hari Pengayoman ke-80, Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan Hukum di Rumah BUMN



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80 tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan Layanan Hukum Terpadu bekerja sama dengan Rumah BUMN Banjarmasin, Kamis (24/7). Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat dukungan layanan hukum kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin siap naik kelas dan bersaing di pasar.

Kegiatan yang berlangsung di Rumah BUMN Banjarmasin ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Riswandi, serta CEO Rumah BUMN Banjarmasin Muhammad Ulil Amri.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alex Cosmas Pinem menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM. Fokus layanan diarahkan pada sektor Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), dua aspek hukum yang dinilai krusial bagi kemajuan dan keberlangsungan usaha kecil menengah.

“Kami ingin UMKM Mitra Binaan Rumah BUMN memahami pentingnya pendaftaran merek, tidak hanya dari sisi prosedur dan manfaat hukum, tetapi juga sebagai strategi bisnis jangka panjang,” ujar Alex.

Alex juga mengapresiasi peran aktif Rumah BUMN Banjarmasin yang dikelola oleh Pertamina dan Kementerian BUMN, yang saat ini membina lebih dari 600 UMKM. Menurutnya, kolaborasi antara Kemenkum dan Rumah BUMN merupakan langkah strategis yang tepat sasaran dalam memperkuat ekosistem UMKM di Kalimantan Selatan.

Acara ini dilengkapi dengan sesi pemaparan dari narasumber Kanwil Kemenkum Kalsel terkait layanan AHU dan KI serta pembukaan booth konsultasi yang memberikan fasilitasi langsung kepada peserta. Diskusi berjalan interaktif dan peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung baik, serta menghasilkan sinergi positif yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk Rumah BUMN dan mitra-mitra pembina UMKM lainnya.

Dukung Pendidikan Global, Raperbup Beasiswa Luar Negeri Balangan Diharmonisasi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri pada Kamis (24/07) di Balai Pertemuan Garuda Kanwil. Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyusun regulasi daerah yang tertib, terarah, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman hukum untuk pelaksanaan program beasiswa ke luar negeri bagi mahasiswa asal Kabupaten Balangan. Program ini bertujuan mencetak generasi yang berkualitas, berdaya saing global, serta memberikan peluang pendidikan tinggi kepada masyarakat, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam paparannya, tim perancang menyampaikan pentingnya ketepatan redaksional, kejelasan norma, serta sinkronisasi antar ketentuan agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dan akuntabel. Proses harmonisasi ini juga menjadi langkah strategis agar Perbup yang ditetapkan nantinya memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah menciptakan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, khususnya melalui sektor pendidikan.



Konsisten Sebarluaskan Informasi Hukum, Kanwil Kemenkum Kalsel Kolaborasi dengan SMPN 1 Banjarmasin Gelar Workshop Anti-Perundungan



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Penyuluh Hukum berkolaborasi dengan SMP Negeri 1 Banjarmasin melaksanakan kegiatan Workshop Anti-Perundungan bertema "Mari Berteman dengan Asyik Tanpa Mengusik". Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 22 hingga 24 Juli 2025, dan diikuti oleh 50 siswa-siswi perwakilan dari kelas VII, VIII, dan IX.

Workshop ini merupakan bentuk nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menyebarkan informasi hukum secara berkelanjutan, khususnya kepada pelajar usia sekolah. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, aman, dan nyaman, serta sebagai langkah preventif terhadap terjadinya kekerasan pada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

Penyuluh Hukum Ahli Muda, Dianor, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa kegiatan yang telah memasuki hari ketiga dan berlangsung dengan lancar serta disambut antusias oleh para peserta.

"Siswa-siswi sangat aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain menerima materi mengenai perundungan, para peserta juga diajak untuk mengampanyekan gerakan anti-perundungan di lingkungan sekolah mereka," ungkap Dianoor.

Salah satu bentuk antusiasme peserta terlihat saat sesi kerja kelompok. Setiap kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan peserta lainnya. Kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan public speaking para siswa, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana mereka memahami materi yang disampaikan.

Menutup rangkaian kegiatan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 1 Banjarmasin, Nurul Herliani, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan edukasi hukum kepada para siswa. Ia juga mengungkapkan bahwa kerja sama ini telah terjalin selama empat tahun terakhir dan diharapkan dapat terus berlanjut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada tim dari Kanwil Kemenkum Kalsel yang telah menjadi narasumber dalam kegiatan workshop ini. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang," ujar Nurul.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Dianor yang menyampaikan materi Kampanye Anti-Bullying di Sekolah, serta Tulus Achir Cahyadi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama yang menyampaikan materi tentang Bahaya Bullying.



Perkuat Fondasi Inovasi Daerah, Kementerian Hukum Kalsel Sosialisasikan Pentingnya Perlindungan KI di Tanah Bumbu



Banjarmasin, KI_Info — Perlindungan terhadap karya dan inovasi lokal kini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan berbasis potensi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai Fondasi Inovasi dan Pembangunan Daerah yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, pada Jumat (25/7).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran perangkat daerah serta para pelaku inovasi dan UMKM di Kabupaten Tanah Bumbu. Sambutan pembuka disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tanah Bumbu yang menekankan urgensi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai elemen strategis dalam menjaga orisinalitas dan keberlanjutan inovasi lokal.

“Tanpa perlindungan hukum yang jelas, inovasi bisa hilang begitu saja. Karena itu, peran Kekayaan Intelektual sangat strategis dalam pembangunan daerah yang berbasis kreativitas dan keunikan lokal,” ujar Aji Rifani memberikan pandangannya.

Sesi pemaparan materi utama dibawakan oleh M. Aji Rifani, Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara komprehensif berbagai bentuk Kekayaan Intelektual seperti merek, hak cipta, desain industri, serta potensi indikasi geografis, yang seluruhnya dapat menjadi aset hukum yang melindungi serta mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif secara legal dan berkelanjutan.

Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung dinamis, para peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan terkait prosedur pendaftaran merek, perlindungan hak cipta, hingga kendala-kendala administratif yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha dan inovator di daerah.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga diberikan oleh tim Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) Kantor Wilayah, termasuk layanan Help Desk Kekayaan Intelektual yang siap memberikan informasi lanjutan serta pendampingan teknis bagi masyarakat maupun instansi pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berharap kesadaran terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di Tanah Bumbu dapat semakin meningkat. Diharapkan, inovasi-inovasi lokal yang lahir dari kearifan dan kreativitas masyarakat tidak hanya tumbuh dan dikenal luas, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Jajaran Pimti Kemenkum Kalsel Ikuti Penilaian Kompetensi JPT Pratama Tahun 2025



Depok, Humas_Info – Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Potensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum. Kegiatan ini berlangsung secara luring pada 25 hingga 26 Juli 2025 di Kampus BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat.

Peserta dari Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan yang mengikuti penilaian ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah.

Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, para asesor SDM Aparatur, serta 58 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam manajemen talenta ASN, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang ASN Tahun 2023.

“Kepemimpinan yang efektif sangat dibutuhkan di tengah dinamika birokrasi, transformasi digital, serta tuntutan publik terhadap pelayanan yang profesional dan akuntabel,” ujar Gusti Ayu.

Penilaian kompetensi ini mengukur delapan kompetensi manajerial, satu kompetensi sosial kultural (perekat bangsa), serta delapan aspek potensi. Metode yang digunakan meliputi assessment center, psikotes, analisis kasus, Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara berbasis kompetensi. Tim asesor terdiri dari 33 orang asesor SDM Aparatur dengan berbagai jenjang keahlian, dibantu tim pendukung dari BPSDM Hukum.

Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, dalam laporannya menyebutkan bahwa hasil dari penilaian ini akan menjadi dasar penting dalam pembinaan karier, pengisian jabatan, dan pengembangan kompetensi para pejabat tinggi pratama. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam menjaga mutu penyelenggaraan assessment center yang telah terakreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaiknya sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan birokrasi masa depan.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/@kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id